

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Skandal Cambridge Analytica menandai era baru dalam pemanfaatan Big Data untuk kepentingan politik. Sejarah perusahaan ini menunjukkan bagaimana teknik pemetaan psikologis dan *microtargeting* mampu mengubah strategi kampanye secara drastis. Dengan memanfaatkan data pengguna dari media sosial, Cambridge Analytica berhasil menciptakan model kepribadian individu yang kemudian digunakan untuk menyebarkan pesan politik yang sangat personal dan efektif. Kasus ini memperlihatkan bahwa teknologi tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana manipulasi yang kuat dalam membentuk opini publik.

Fenomena *post-truth* yang berkembang di era digital semakin diperkuat oleh teknik Cambridge Analytica. Dalam lingkungan informasi yang dipenuhi oleh disinformasi dan bias algoritma, masyarakat semakin sulit membedakan antara fakta dan opini yang telah dikondisikan oleh pihak tertentu. Konsep postmodernisme yang menolak kebenaran tunggal turut mempercepat lahirnya *post-truth*, di mana emosi dan keyakinan subjektif lebih berperan dalam membentuk opini publik dibandingkan fakta objektif. Manipulasi psikologis yang dilakukan oleh Cambridge Analytica pada pemilu Amerika Serikat menunjukkan bagaimana informasi yang dikendalikan dapat mempengaruhi hasil pemilu.

Peran media sosial dalam menyebarkan post-truth menjadi semakin dominan. Facebook dan platform digital lainnya tidak hanya menjadi sarana berbagi informasi, tetapi juga berfungsi sebagai ruang gema yang memperkuat bias individu. Algoritma yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan pengguna secara tidak langsung menciptakan segregasi informasi, di mana seseorang hanya terekspos pada perspektif yang sesuai dengan keyakinannya. Hal ini memperdalam polarisasi politik dan memperlemah diskursus publik yang sehat.

Dampak dari strategi Cambridge Analytica tidak hanya terbatas pada Pemilu Amerika Serikat 2016. Teknik yang sama juga diterapkan dalam berbagai pemilu di negara lain, menunjukkan bahwa eksploitasi data pribadi dapat menjadi ancaman serius terhadap demokrasi. Penggunaan Big Data dalam kampanye politik harus mendapatkan perhatian lebih dalam regulasi dan etika penggunaannya. Tanpa pengawasan yang ketat, teknologi ini dapat terus dimanfaatkan oleh aktor politik untuk tujuan yang tidak selalu menguntungkan masyarakat secara luas.

Keseluruhan fenomena ini menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital harus diimbangi dengan kesadaran akan dampak sosial dan politiknya. Masyarakat harus lebih kritis terhadap informasi yang mereka konsumsi dan memahami bagaimana algoritma media sosial dapat membentuk cara pandang mereka. Sementara itu, pemerintah dan lembaga pengawas perlu menetapkan regulasi yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi dalam kepentingan politik.

4.2 Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat lebih mendalami bagaimana efektivitas microtargeting dalam membentuk keputusan politik individu, khususnya di luar konteks Amerika Serikat. Selain itu, studi lebih lanjut mengenai peran regulasi dalam mengontrol pemanfaatan data pribadi dalam kampanye politik dapat memberikan wawasan tentang kebijakan yang paling efektif dalam melindungi hak privasi masyarakat. Kajian tentang dampak psikologis dari paparan konten yang telah disesuaikan dengan profil individu juga menjadi bidang yang menarik untuk diteliti guna memahami sejauh mana manipulasi digital mempengaruhi perilaku sosial dan politik seseorang.

Penelitian juga bisa diarahkan pada eksplorasi hubungan antara tingkat literasi digital masyarakat dengan kerentanannya terhadap konten *post-truth*. Hal ini penting untuk memahami apakah kemampuan masyarakat dalam memilah informasi digital dapat mengurangi dampak manipulatif dari algoritma media sosial dan strategi kampanye yang berbasis data.

Selain itu, pengembangan model etika teknologi dalam pengumpulan dan pemanfaatan data dapat menjadi kontribusi akademik yang signifikan. Model ini dapat menjadi dasar bagi para pembuat kebijakan dan pelaku industri teknologi untuk merumuskan standar tanggung jawab sosial dalam membangun sistem informasi digital yang lebih adil, transparan, dan inklusif.